

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adonara, F. F. (2014). *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. CV. Mandar Maju.
- Djaja S. Meliala. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- Harahap, Y. (1982). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Harsono, B. (2008). *Konsepsi Pemikiran Tentang Undang-Undang Hak Tanggungan*. Alumni.
- Harun, O. S. M. dan M. N. (2017). *Pengantar Hukum Perdata*. Setara Press.
- Herlien Budiono. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*.
- Masjchon, S. S. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*. Liberty.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. PT. Cipta Aditya Bakti.
- Ngadijarno, F. . (2008). *Badan Lelang; Teori dan Praktek, Departemen Keuangan Republik Indonesia*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesi: suatu penjelasan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo

Persada.

Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Kencana.

Setiawan, R. (2007). *Pokok-pokok Hukum perikatan*. Putra A. Bardin.

Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa.

Subekti, R. (1992). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Alumni.

Subekti, R. (2007). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Subekti, R. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.

Tobing, G. H. . L. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*.

Erlangga.

Usman, R. (2016). *Hukum Lelang*. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

C. Sumber Lain

Fitriani, N. T. A. (2017). *KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN RISALAH LELANG BAGI PEMENANG LELANG HAK TANGGUNGAN ATAS PERISTIWA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN*.

Fitriani, N. T. A. (2022). *EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 27/PMK.06/2016 TENTANG PERTUNJUK PELAKSANAAN LELANG*.

Hernawati, R., (Manajemen, J. S.-J. I. M., & 2020, undefined. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *journal.stiemb.ac.id*, 4(1).

Sasana, D. A.-J. H., & 2022, undefined. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis. *ejurnal.ubharajaya.ac.id*, 8(1), 153–162.
<https://doi.org/10.59999/v8i1.1101>

Wawancara dengan Staff Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, 13 Juni 2022.